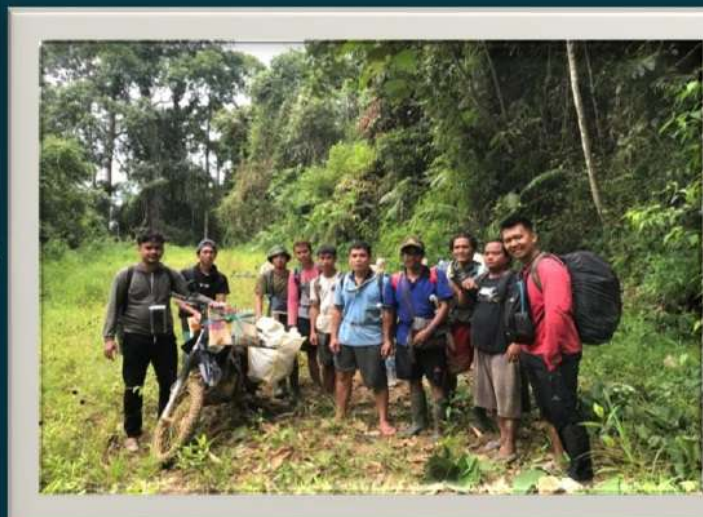


**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**BPKH WILAYAH XXI PALANGKA RAYA**  
**TAHUN 2022**

**Palangka Raya, 31 Maret 2023**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai evaluasi terhadap hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya selama tahun 2022 (Januari s.d. Desember 2022) sebagai penyelenggara program pemerintah di bidang kehutanan khususnya bidang keplanologian yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Dengan berakhirnya pelaksanaan DIPA kegiatan tahun 2022, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya telah menyelesaikan kegiatannya dan merupakan implementasi tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024. Renstra ini berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 yang telah disempurnakan yang digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan dalam upaya memenuhi tujuan utama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat.

Palangka Raya, 31 Maret 2023  
Kepala Balai,  
  
Doni Sri Putra, S.Hut., M.E.  
NIP. 19740909 199903 1 007



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	1
C. Sumber Daya Manusia.....	5
D. Permasalahan Yang Sedang Dihadapi.....	7
II. PERENCANAAN KINERJA .....	8
A. Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 .....	8
B. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.....	10
C. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) .....	12
D. Perjanjian Kinerja.....	14
E. Reviu atas dokumen perencanaan.....	17
III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	18
B. Realisasi Anggaran .....	34
C. Penghargaan Atas Prestasi Kinerja.....	39
IV. PENUTUP.....	40

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya yang berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, BPKHTL merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Balai Pejabat Administrator (Eselon IIIa) dibantu oleh 3 (tiga) Pejabat Pengawas (Eselon IVa) yakni Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan dan Kepala Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan; serta Kelompok Jabatan Fungsional.

### **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan;
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
- d. Penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan

- penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- e. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
  - f. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
  - g. Penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
  - h. Penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
  - i. Pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - j. Fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - k. Pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;
  - l. Pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
  - m. Pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah; dan
  - n. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Di samping TUPOKSI yang telah ditetapkan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI berkedudukan di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

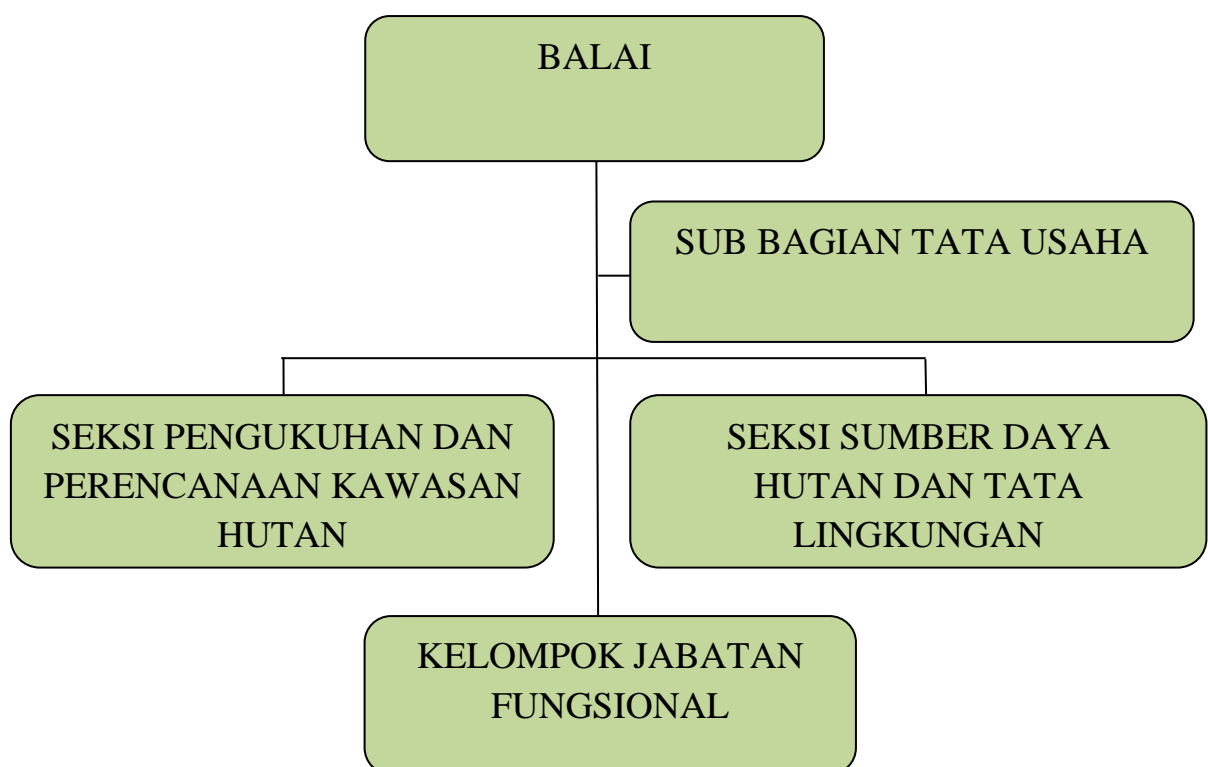
Penjabaran uraian tugas pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan dan Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan; sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan.

Tugas pada masing-masing seksi/sub bagian sebagai berikut:

- a. **Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi.
- b. **Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan kawasan hutan; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.
- c. **Seksi Informasi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan** tugas melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan; verifikasi data

dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah; dan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah.

- d. Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Gambar : Struktur Organisasi BPKHTL Wilayah XXI : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan.

### C. Sumber Daya Manusia

Deskripsi Sumber Daya Manusia pada BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya tahun 2022 berjumlah 60 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 35 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 25 orang. Pengalokasian pegawai pada masing-masing Sub Bagian/Seksi sebagai berikut :

Tabel. Deskripsi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan s/d 31 Desember 2022

No	Uraian	2022				
		a	B	c	d	Jml
1	2	3	4	5	6	7
1	Golongan IV	3	1	-	-	4
2	Golongan III	13	3	5	6	27
3	Golongan II	-	1	2	1	4
4	Golongan I	-	-	-	-	-
Jumlah						35

Tabel. Deskripsi Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin s/d 31 Desember 2022

No	Uraian	2022		
		LK	PR	JML
1	2	3	4	5
1.	Golongan IV	3	1	4
2.	Golongan III	22	5	27
3.	Golongan II	1	3	4
4.	Golongan I	-	-	-
Jumlah				35

Keterangan : LK = Laki-laki PR = Perempuan



Tabel. Deskripsi Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan s/d 31 Desember 2022

No	Uraian	2022		
		KHL	NK	JML
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>
1.	Pasca Sarjana	8	1	9
2.	Sarjana (S1)	17	4	21
3.	Diploma III	-	2	2
4.	Diploma I	-	-	-
5.	SLTA	2	1	3
6.	SLTP	-	-	-
7.	SD	-	-	-
Jumlah				35

Keterangan : KHL = Kehutanan & Lingkungan NK = Non Kehutanan

Tabel. Deskripsi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menurut Tingkat Pendidikan s/d 31 Desember 2022

No	Uraian	2022		
		KH	NK	JML
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>
1.	Pasca Sarjana	-	-	-
2.	Sarjana (S1)	4	5	8
3.	Diploma III	2	-	2
4.	Diploma I	-	-	-
5.	SLTA/ SMK Kehutanan	5	9	14
6.	SLTP	-	1	1
7.	SD	-	-	-
Jumlah				25

Keterangan : KH = Kehutanan NK = Non Kehutanan

#### **D. Permasalahan yang dihadapi**

Wilayah kerja BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya meliputi 1 (satu) Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah. Luas wilayah Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 2015 – 2035 dari luas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah adalah 15.514.811,71 ha dan selanjutnya mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.529/Kpts-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tentang Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah luas kawasan hutan adalah 11.931.843,60 ha atau 77,62 % dari luas daratan, dan luas daratan Provinsi Kalimantan Tengah adalah 15.372.910,92 ha.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BPKHTL pada areal yang sangat luas tersebut, jumlah SDM yang belum memadai baik tenaga administrasi maupun teknis serta juga belum di dukung dengan sarana prasarana yang cukup dalam mendukung pelaksanaan tugas.

## **II. PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024**

Dalam rangka mendukung dan berkontribusi dalam Pembangunan Nasional khususnya bidang lingkungan hidup dan kehutanan kurun waktu Tahun 2020-2024, BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya mempunyai peran strategis dalam mewujudkan pemantapan kawasan hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 yang merupakan kumpulan program intervensi yang harus menjadi bagian dari seluruh kegiatan teknis di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Program intervensi yang akan dikembangkan meliputi:

#### **1. Intervensi Kebijakan**

Kebijakan/regulasi/peraturan/NSPK yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024.

#### **2. Intervensi Sumber Daya Manusia**

Program pengembangan SDM (kualitas dan kuantitas) yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024.

#### **3. Intervensi Teknologi**

Teknologi yang diperlukan untuk mempermudah atau sebagai syarat pencapaian sasaran strategis BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024.

#### **4. Intervensi Anggaran**

Anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024.

## 5. Intervensi Kemitraan

Program pelibatan para pihak dan pengembangan kemitraan para pihak untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024.

Renstra BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024 yang mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 yang mana sebagai alat dalam penetapan target dan pemantauan implementasi kegiatan. Rencana strategis ini merupakan gambaran secara garis besar dari kegiatan BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian rencana strategis ini menjadi acuan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya ini, diharapkan pembangunan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan selama 5 (lima) tahun dapat lebih terarah yang pada akhirnya pemantapan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat terwujud pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis kegiatan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2022, disajikan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Rencana Strategis (Renstra) BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan									
	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	Hektar	1.599.472,94	2.579.602,5	2.210.922,56	3.616.501,55	-	-
		Panjang Batas Kawasan Hutan yang Telah Diselesaikan Hak-hak Pihak Ketiga	Km	1.440,5	5.458,61	2.068,45	4.360	-	13.327,56
		Dokumen Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTI	Dokumen	-	-	-	-	-	-

		Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Hektar	13.000	104.971	105.073	106.521	106.521	436.086
	Terselesaikanny a pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	Provinsi	1	1	1	1	1	1
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan									
	Tersedia dan termutakhirkan ya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKHTL	Klaster	10	10	10	10	10	50
		Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKHTL	Dokumen	1	1	1	1	1	5

## B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Sesuai dengan rencana kerja BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya tahun anggaran 2022 diusulkan beberapa kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp.19.746.881.513,-** (*Sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah*) sesuai dengan pengesahan DIPA (APBN-P) Nomor : SP DIPA-029.06.2.145160/2022 tanggal 17 Nopember 2021. Anggaran yang semula direncanakan mengalami revisi selama 9 kali karena untuk penghematan dan penambahan anggaran.

Adapun rincian kegiatan dan anggaran Rencana Kerja 2022 sebagaimana tersebut pada Tabel 2. berikut ini.

Tabel 2. Revisi Kegiatan dan Anggaran BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2022

Program : Program Kualitas Lingkungan Hidup

Kegiatan : Pencegahan Dampak Lingkungan

Matrik Perubahan (Sebelum-Sesudah)						
BPKH Wilayah XXI						
Sebelum			Sesudah			
Kegiatan	Volume	Anggaran	Kegiatan	Volume	Anggaran	
5436.QMA.004 Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKH	1 Layanan	22,038,000	5436.QMA.004 Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKH	1 Layanan	22,038,000	
5436.QMA.005 Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKH	1 Layanan	20,000,000	5436.QMA.005 Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKH	1 Layanan	20,000,000	
5433.PBV.001 Inventarisasi, Verifikasi, BATB obyek TORA dalam Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	1,732,642,000	5433.PBV.001 Inventarisasi, Verifikasi, BATB obyek TORA dalam Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	660,135,000	
5433.PBV.002 Panjang Batas Kawasan Hutan yang Telah diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan	10,000,000,000	5433.PBV.002 Panjang Batas Kawasan Hutan yang Telah diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan	12,012,021,000	
5434.BMA.003 Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	1 Layanan	97,000,000	5434.BMA.003 Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	1 Layanan	97,000,000	
6744.BAC.001 Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	19 Badan Usaha	161,500,000	6744.BAC.001 Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	19 Badan Usaha	161,500,000	
6744.QDB.001 Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan di KPH	-	-	6744.QDB.001 Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan di KPH	1 Lembaga	355,000,000	
5432.EBA.962 Layanan Umum	1 Layanan	756,000,000	5432.EBA.962 Layanan Umum	1 Layanan	756,000,000	
5432.EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan	5,303,955,000	5432.EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan	5,742,955,000	
Jumlah		18,093,135,000	Jumlah		19,826,649,000	

Hasil dari Perubahan tersebut adalah anggaran BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya menjadi sebesar **Rp. 19.826.649.000,-** (*Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

### C. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Tabel 3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Anggaran BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2022

Program : Kualitas Lingkungan Hidup  
Kegiatan : Pencegahan Dampak Lingkungan

No.	Output	Sub Output	Komponen	Vol	Satuan	Jumlah Biaya
	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1. Inventaris, Verifikasi, BATB Obyek TORA dalam Kawasan Hutan	Penataan Btasa Kawasan Hutan Obyek TORA	1	Kebijakan Rekomendasi	660.135.000
		2. Panjang Batas kawasan Hutan yang telah diselesaikan Hak-hak pihak ketiga	Penataan Batas Kawasan Hutan	1	Kebijakan Rekomendasi	12.012.021.000
	Pencegahan Dampak Lingkungan	Data dan informasi	1. Layanan Kajian Tata lingkungan Kebijakan Wilayah Kerja dan Sektor di Wilayah Kerja BPKH	1	layanan	22.038.000
			2. Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKH	1	Layanan	22.000.000
	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Verifikasi PNPB	19	Lokasi	161.000,000
	Inventarisasi dan Pemantauan SDH	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	Penafsiran Citra Xatelit Resolusi Sedang	1	Layanan	97.000.000
	Fasiistasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitas rencana pengelolaan hutan di KPH	Fasilitasi rancangan tata huta dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	1	Lembaga	355.000.000

	Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Sektetariat Ditjen PKTL	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1. Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	1	Keg	84.822.000
			2. Pelaksanaan dan Pemantauan Evaluasi	1	Keg	85.155.000
			3. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	1	Keg	43.311.000
			4. Pengelolaan Kepegawaian	1	Keg	53.840.000
			5. Pelayananan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	1	Keg	478.912.000
	Layanan Perkantoran	Operasional perkantoran	1. Pembayaran gaji dan tunjangan	12	Bulan	3.741.783.000
			2. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12	Bulan	2.001.172.000



#### D. Perjanjian Kinerja

Kode	Kegiatan / KRO / RO	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>5436</b>	Pencegahan dampak lingkungan	Dokumen hasil indentifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	2 Layanan
5436.QMA.004	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Dokumen hasil indentifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1 Layanan
5436.QMA.005	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Dokumen hasil indentifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1 Layanan
<b>5433</b>	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga; Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	
5433.PBV	Kebijakan bidang kehutanan	01 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan	2 Rekomendasi kebijakan

		inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL diterbitkan; 02 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan	
5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL diterbitkan	1 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.002	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan	1 Rekomendasi kebijakan
<b>5434</b>	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKHTL; Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKHTL.	
5434.BMA	Data dan informasi publik	Penyediaan informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan terlayani	1 Layanan

5434.BMA.003	Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKHTL	Penyediaan data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKHTL terlayani	1 Layanan
<b>6744</b>	Perencanaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	
6744.BAC	Pelayanan publik kepada badan usaha	Hasil Verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	19 Badan usaha
6744.BAC.001	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	Pelaksanaan Verifikasi PNPB Penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL terlaksana	19 Badan usaha
<b>6744</b>	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	
6744.QDB.001	Fasilitasi rencana pengelolaan hutan di KPH	Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	1 Lembaga
<b>5432</b>	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	01 Nilai Sakip Ditjen PKTL; 02 Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; 03 Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	
5432.EBA	Layanan dukungan manajemen satker	Layanan dukungan manajemen satker	2 Layanan

		terlaksana	
5432.EBA.962	Layanan Umum	Layanan Umum terlaksana	1 Layanan
5432.EB.994	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran terlaksana	1 Layanan

#### **E. Reviu atas Dokumen Perencanaan**

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan prioritas; antara lain yaitu Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran.

Dokumen perencanaan kinerja pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya disusun sudah melalui perencanaan matang yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi dan Tujuan dari Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan.

Kegiatan yang direncanakan meliputi semua tugas pokok dari BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya yang bertujuan untuk pemantapan kawasan hutan di wilayah Kalimantan Tengah. Kegiatan juga disusun sudah mempertimbangkan kemampuan dan jumlah SDM yang ada pada BPKHTL Wilayah XXI palangka Raya sehingga dengan kinerja yang optimal pada akhir tahun anggaran 2022 akan dicapai sasaran fisik sebesar 100 % baik kualitas maupun kuantitasnya.

Diharapkan dengan peran satgas SPIP maka kegiatan yang direncanakan akan dapat terlaksana dengan lancar.

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

##### 1. Metode pengukuran

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Penetapan perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, dan penetapan rencana kerja, meliputi pembuatan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program.
2. Pengukuran kinerja, meliputi pengukuran indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, membandingkan realisasi dengan rencana kerja, kinerja tahun sebelumnya.
3. Pelaporan kinerja, berupa pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dengan format standar laporan yang telah ditetapkan (rinci dengan berbagai indikator dan capaiannya);
4. Pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan kinerja berikutnya secara berkesinambungan.

##### 2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

###### a. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

<i>Sasaran</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target (Volume)</i>	<i>Realisasi (Volume)</i>	<i>% Capaian</i>
Pencegahan dampak lingkungan	Dokumen hasil indentifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	42.038.000	42.027.683	<b>99,64</b>

Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan	12.672.156.000	12.658.072.397	99,98
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKHTL; Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKHTL.	97.000.000	97.000.000	100,00
Perencanaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	161.500.000	161.500.000	100,00
Fasilitasi rencana pengelolaan hutan di KPH	Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan	355.000.000	354.993.385	100,00

	hutan			
Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana	5.742.955.000	5.681.110.880	98,92
Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen	756.000.000	752.177.168	99,49

**b. Efektivitas Capaian Kinerja Tahun 2022**

<i>Sasaran</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>% Capaian Tahun Sebelumnya</i>	<i>% Capaian Tahun Ybs</i>
Pencegahan dampak lingkungan	Dokumen hasil indentifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	99,98	99,64
Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan	Rekomendasai kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan	99,98	99,98
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKHTL; Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKHTL.	99,99	100,00

Perencanaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	99,96	100,00
Fasilitasi rencana pengelolaan hutan di KPH	Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan	-	100,00
Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana	99,32	98,92
Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen	99,92	99,49

**c. Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2022**

<i>Sasaran</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>% Capaian Fisik Tahun Ybs</i>	<i>% Capaian Keuangan Tahun Ybs</i>
Pencegahan dampak lingkungan	Dokumen hasil indentifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	100	99,64
Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan	100	99,98
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKHTL; Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKHTL.	100	100,00



Perencanaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	100	100,00
Fasilitasi rencana pengelolaan hutan di KPH	Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan	100	100,00
Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana	100	98,92
Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen	100	99,49

**d. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra Tahun 2022**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 5 Tahun (Renstra)	Satuan	Realisasi Per Tahun (Periode Renstra)					Total Realisasi s.d. Tahun Ybs	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
				Thn 2020 %	Thn 2021 %	Thn 2022 %	Thn 2023 %	Thn 2024 %		
<b>5436</b>				96,79	99,88	<b>99,64</b>	-	-	296,31	
Pencegahan dampak lingkungan	Dokumen hasil indentifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan	-	Layanan	-	1	2	-	-	3	-
5436.QMA.004 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Dokumen hasil indentifikasi dan pemetaan dampak lingkungan	-	Layanan	-	1	1	-	-	2	-

	usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi									
5436.QMA.005 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Dokumen hasil indentifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	-	Layanan	-	-	1	-	-	1	-
<b>5433</b> Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga; Dokumen hasil inventarisasi , verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	<b>13.327,56</b>	<b>Km</b>	2.411	4.599	2.430	-	-	9.440	70,83

5433.PBV Kebijakan bidang kehutanan	Rekomenda si kebijakan atas pelaksanaan inventarisasi , verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL diterbitkan 02 Rekomenda si kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan									
5433.PBV.001 Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	Rekomenda si kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL diterbitkan									
5433.PBV.002 Panjang batas kawasan hutan yang	Rekomenda si kebijakan									

telah diselesaikan	atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan									
<b>5434</b> Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKHTL;	<b>50</b>	<b>Lokasi</b>	9	6	-	-	-	15	<b>30 %</b>
	Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKHTL.	<b>5</b>	<b>layanan</b>	1	1	1			3	60 %
5434.BMA Data dan informasi publik	Penyediaan informasi dan dokumentasi penguatan dan penatagunaan kawasan hutan terlayani									
5434.BMA.003 Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKHTL	Penyediaan data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKHTL terlayani									

<b>6744</b>										
Perencanaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	5	Laporan	1	1	1	-	-	3	60%
6744.BAC										
Pelayanan publik kepada badan usaha	Hasil Verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	50	Lokasi	6	19	19	-	-	44	88%
6744.BAC.001										
Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	Pelaksanaan Verifikasi PNPB Penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL terlaksana	50	Lokasi	6	19	19	-	-	44	88%
<b>6744</b>										
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	-	Lembaga	-	-	1	-	-	-	-
6744.QDB.001										
Fasilitasi rencana pengelolaan hutan di KPH	Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana									

	pengelolaan hutan KPH									
<b>5432</b>										
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	01 Nilai Sakip Ditjen PKTL; 02 Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; 03 Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	5	Layanan	1	1	1	-	-	3	60%
5432.EBA Layanan dukungan manajemen satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana	10	Layanan	2	2	2	-	-	6	60%
5432.EBA.962 Layanan Umum	Layanan Umum terlaksana	5	Layanan	1	1	1	-	-	3	60%
5432.EB.994 Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran terlaksana	5	Layanan	1	1	1	-	-	3	60%

**e. Menyajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022.**

Kode	Kegiatan / KRO / RO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>5436</b>	Pencegahan dampak lingkungan	Dokumen hasil indentifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	2 Layanan	2 Layanan
5436.QMA.004	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Dokumen hasil indentifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1 Layanan	1 Layanan
5436.QMA.005	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Dokumen hasil indentifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1 Layanan	1 Layanan
<b>5433</b>	Pengukuhan dan Penatagunaan	Panjang batas kawasan hutan	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi kebijakan

	Kawasan Hutan	yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga; Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	kebijakan	
5433.PBV	Kebijakan bidang kehutanan	01 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL diterbitkan; 02 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan	2 Rekomendasi kebijakan	2 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan	1 Rekomendasi kebijakan	1 Rekomendasi kebijakan



		penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL diterbitkan		
5433.PBV.002	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan	1 Rekomendasi kebijakan (2.068,45 Km)	1 Rekomendasi kebijakan (2.430 Km)
<b>5434</b>	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKHTL; Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKHTL.		
5434.BMA	Data dan informasi publik	Penyediaan informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan terlayani	1 Layanan	1 Layanan
5434.BMA.003	Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah	Penyediaan data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja	1 Layanan	1 Layanan

	kerja BPKHTL	BPKHTL terlayani		
<b>6744</b>	Perencanaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL		
6744.BAC	Pelayanan publik kepada badan usaha	Hasil Verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	19 Badan usaha	19 Badan usaha
6744.BAC.001	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	Pelaksanaan Verifikasi PNPB Penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL terlaksana	19 Badan usaha	19 Badan usaha
<b>6744</b>	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH		
6744.QDB.001	Fasilitasi rencana pengelolaan hutan di KPH	Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	1 Lembaga	1 Lembaga
<b>5432</b>	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen	01 Nilai Sakip Ditjen PKTL; 02 Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; 03 Laporan		

	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel		
5432.EBA	Layanan dukungan manajemen satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana	2 Layanan	2 Layanan
5432.EBA.962	Layanan Umum	Layanan Umum terlaksana	1 Layanan	1 Layanan
5432.EB.994	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran terlaksana	1 Layanan	1 Layanan

**f. Realisasi Kinerja BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional (Benschmark Kinerja)**

***a. Realisasi Anggaran Lingkup BPKHTL Wilayah XXI***

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya selaku unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang mengemban tugas melaksanakan Program Kualitas Lingkungan Hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan kinerja BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya melalui kegiatan DIPA Tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar sebesar **Rp. 19.826.649.000,-** (*Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*). Hasil capaian kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar **Rp. 19.746.881.513,-** (*Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah*) atau penyerapan keuangan sebesar **99,64 %** dengan fisik sebesar 100%.

Realisasi kinerja BPKHTL untuk Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan tahun 2022 dengan target 2.068,45 Km, dapat direalisasikan sebanyak 2.430 Km (117%).

#### ***b. Realisasi Anggaran Lingkup Ditjen PKTL***

Berdasarkan data pada aplikasi <https://spanint.kemenkeu.go.id>, realisasi penyerapan DIPA Ditjen PKTL TA 2022 untuk semua jenis belanja sebesar **Rp 409.223.573.573,-** atau mencapai **99,39%** dari total pagu sebesar Rp 411.730.791.000,- dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp 138.748.606.592,-, belanja barang sebesar Rp 254.076.150.052,- dan belanja modal sebesar Rp 16.398.816.929,-.

Hasil pengukuran kinerja utama Ditjen PKTL dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi menunjukkan bahwa capaian kinerja utama rata-rata tahun 2022 sebesar 110%.

#### **g. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Tantangan Wilayah kerja kawasan hutan BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya yang terluas se-Indonesia meliputi 1 (satu) Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah. Luas wilayah Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 2015 - 2035 dari luas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah adalah 15.514.811,71 ha dan selanjutnya mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.529/Kpts-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tentang Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah luas kawasan hutan adalah 11.931.843,60 ha atau 77,62 % dari luas daratan, dan luas daratan Provinsi Kalimantan Tengah adalah 15.372.910,92 ha.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BPKHTL pada areal yang sangat luas tersebut, jumlah sumber daya manusia yang belum memadai baik tenaga administrasi maupun teknis dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Adapun hal-hal yang menunjang keberhasilan kualitas atas capaian kinerja yakni dengan :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai;
2. Dorongan para pihak dengan dibangunnya sinergi kerjasama yang baik antar stakeholder terkait baik antar satuan kerja BPKHTL / Dinas;
3. Strategi detasharing pegawai /BKO;
4. Strategi perencanaan yang baik;
5. Pengendalian internal;
6. Sumber daya manusia yang kompeten, berpengalaman; dan
7. Peralatan yang memadai.

sehingga kualitas atas capaian kinerja yang dicapai **Sangat Baik**.

## **B. Realisasi Anggaran**

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya selaku unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang mengemban tugas melaksanakan Program Kualitas Lingkungan Hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan kinerja BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya melalui kegiatan DIPA Tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar sebesar **Rp. 19.826.649.000,-** (*Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*). Hasil capaian kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 31 Desember 2022

teralisasi sebesar **Rp. 19.746.881.513,-** (*Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah*) atau penyerapan keuangan sebesar **99,64 %** dengan fisik sebesar 100%. Meliputi kegiatan :

Kode	Kegiatan / KRO / RO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>5436</b>	Pencegahan dampak lingkungan	Dokumen hasil indentifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	2 Layanan	2 Layanan
5436.QMA.004	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Dokumen hasil indentifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1 Layanan	1 Layanan
5436.QMA.005	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Dokumen hasil indentifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1 Layanan	1 Layanan
<b>5433</b>	Penguatan dan	Panjang batas	2	2 Rekomendasi

	Penatagunaan Kawasan Hutan	kawasan hutan yang telah diselesaikan hak- hak pihak ketiga; Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	Rekomendasi kebijakan	kebijakan
5433.PBV	Kebijakan bidang kehutanan	01 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL diterbitkan; 02 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan	2 Rekomendasi kebijakan	2 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi,	1 Rekomendasi kebijakan	1 Rekomendasi kebijakan

	kawasan hutan	verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL diterbitkan		
5433.PBV.002	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan	1 Rekomendasi kebijakan (2.068,45 Km)	1 Rekomendasi kebijakan (2.430 Km)
<b>5434</b>	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKHTL; Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKHTL.		
5434.BMA	Data dan informasi publik	Penyediaan informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan terlayani	1 Layanan	1 Layanan
5434.BMA.003	Data dan informasi pemantauan	Penyediaan data dan informasi pemantauan SDH	1 Layanan	1 Layanan



	SDH di wilayah kerja BPKHTL	di wilayah kerja BPKHTL terlayani		
<b>6744</b>	Perencanaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL		
6744.BAC	Pelayanan publik kepada badan usaha	Hasil Verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	19 Badan usaha	19 Badan usaha
6744.BAC.001	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	Pelaksanaan Verifikasi PNPB Penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL terlaksana	19 Badan usaha	19 Badan usaha
<b>6744</b>	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH		
6744.QDB.001	Fasilitasi rencana pengelolaan hutan di KPH	Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	1 Lembaga	1 Lembaga
<b>5432</b>	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis	01 Nilai Sakip Ditjen PKTL; 02 Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL;		

	lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	03 Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel		
5432.EBA	Layanan dukungan manajemen satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana	2 Layanan	2 Layanan
5432.EBA.962	Layanan Umum	Layanan Umum terlaksana	1 Layanan	1 Layanan
5432.EB.994	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran terlaksana	1 Layanan	1 Layanan

### C. Penghargaan Atas Prestasi Kinerja

Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, mulai dari SDM hingga sarana dan prasarana kami selalu berupaya untuk menjadi semakin lebih baik, kepada seluruh pegawai yang telah membantu dalam suksesnya pelaksanaan kegiatan tahun 2022 kami sangat mengapresiasi atas kinerja dan prestasi yang sudah menunjukkan kinerja positif selama tahun 2022.

#### IV. PENUTUP

Secara umum pencapaian kinerja kegiatan program Planologi dan Tata Lingkungan Tahun 2022 pada BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya **SANGAT BAIK SEKALI**. Hal ini ditandai dengan terealisasinya kegiatan program Planologi dan Tata Lingkungan Tahun 2022 sebesar **99,64 %** Namun demikian prestasi ini masih harus perlu dipertahankan atau terus ditingkatkan untuk pencapaian keberhasilan program dengan tujuan yang tepat sasaran yang berpedoman pada Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

Persentase pencapaian kinerja kegiatan program Planologi dan Tata Lingkungan Tahun 2022 pada BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya, dari sumber anggaran tersedia dalam DIPA BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2022, yakni :

1. Program Planologi dan Tata Lingkungan Tahun 2022, sebesar **Rp. 19.826.649.000,-** (*Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
2. Pencapaian kinerja kegiatan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan realisasi sebesar **Rp. 19.746.881.513,-** (*Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah*),- atau penyerapan keuangan sebesar **99,64 %**.